

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA KANTOR DISTRIK OKHIKA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Santrio Kamaluddin

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance pada kantor distrik Okhika kabupaten Pegunungan Bintang dengan focus kajian pada tiga indikator khusus yaitu Transparansi, Penegakan hukum dan Akuntabilitas, hal tersebut peneliti pilih sehubungan gejala yang Nampak pada tiga indikator tersebut berdasarkan hasil pengamatan awal.

Instrument utama yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam permasalahan yang dijadikan focus kajian dalam penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan tahapan : reduksi data, display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1). Pada indikator transparansi sejauh ini capaiannya relative Baik, karena pihak distrik selalu berupaya memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada public atau masyarakat yang membutuhkannya; 2) pada indikator penegakan hukum sebagai cerminan good governance sejauh ini capaiannya relative baik walaupun belum optimal, terutama dalam hal peningkatan disiplin pegawai yang masih mengalami peningkatan maksimal secara khusus dalam hal keaktifan di kantor ; 3) pada indikator akuntabilitas sejauh ini berjalan cukup baik, hal yang menjadi perhatian khusus pada indikator ini adalah ketepatan waktu dalam menyusun dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban dari pegawai kepada pimpinan yang terkadang masih mengalami keterlambatan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati memahami mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan public menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat (Dwiyanto, 2005).

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan

demokrasi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Atas dasar tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut, adapun lokasi prioritas yang dipilih yaitu Kantor Distrik Okhika dikarenakan peneliti telah mengamati pada wilayah tersebut dan teridentifikasi bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sejauh ini

cenderung masih belum optimal pada instansi tersebut.

B. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. sedarmayanti, PT. Mandar maju, 2003). *Good Governance* tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Bintoro Tjokromidjojo memandang *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam Negara berkembang. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Menurut Mardiasmo (1999:18) *Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik.

Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab (2002:34). *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas

kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector dan masyarakat (effendi, 1996:47)

Dalam sistem admimistrasi Indonesia penerapan *good governance* seperti dalam pengertian yang di kembangkan united nation development program. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan, januari 1997 yang di kutip dari bulletin informasi program kemitraan untuk pembaharuan tata pemerintahan di Indonesia (*Partnership for good governance reform in Indonesia*) , 2000. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengola urusan-urusan Negara pada setiap tingkat.

2. Konsep Good Governance

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi public dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang public.

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu

memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerinthan (good governance).

Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2008) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholders untuk mewujudkannya.

3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:74) bahwa prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari :

a. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijakan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan cost and benefit analysis (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan

sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

b. Keterbukaan dan transparan (*openess and transparency*)

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas/fungsi aparatur pemerintah (instansi) yang bersangkutan harus disediakan secara benar, misalnya data PNS oleh BAKN, data guru oleh Depdiknas, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, dan sebagainya. Perlunya dihindari adanya data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik (*public policy*) yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang sebenarnya, maka keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran (pemborosan), dan penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana.

c. Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masyarakat.

Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idola. Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai

dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas-batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa komitmen ini, maka yang timbul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

4. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

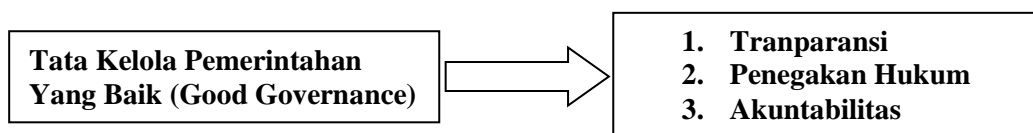
“Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi”, MTI, Jakarta, Mei 2000. Dalam perspektif MTI, *good governance* mensyaratkan empat azas, yaitu: transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*), dan kesinambungan (*sustainability*), dengan pengertian sebagai berikut:

Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.

B. Kerangka Konseptual



C. Variabel Dan Indikator Penelitian

Variabel menurut Efendy dalam (Sony 2004:41) yaitu merupakan suatu konsep yang mempunyai fariasi Nilai-nilai. Variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas. Konsep adalah abstraksi atau penggambaran dari fenomena tertentu. Variabel sering disebut juga sebagai objek atau masalah penelitian.

Indicator adalah variabel yang mengindikasikan atau memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Berkaitan dengan masalah yang diteliti maka penulis perlu menetapkan variabel secara jelas dan tepat, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat pertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, apa bila dilihat dari masalah tersebut maka yang menjadi variabel adalah variabel tunggal yaitu “ Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang

berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum(*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Evaluatif yaitu maksud dari penulis akan melakukan penelitian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan sifat penelitian adalah Deskriptif adalah penelitian yang di lakukan dengan variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain.

Sebagai dasar dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun Dan Effendi,1995.3).

Sedangkan ciri-ciri dari penelitian ini adalah pengumpulan data dari responden yang banyak

jumlah dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui variabel-variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugioyono,2005.11).

B. Unit Analisis

Unit analisa data yang diambil oleh peneliti menggunakan teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian diskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran tanpa membuat kesimpulan-kesimpulan berarti terhadap data yang diperoleh.

Unit analisis di lakukan didalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.

C. Informan

Informan adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas kondisi daerah penelitian dan mampu memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 orang informan yaitu: Kepala distrik okhika, Sekretaris distrik okhika, Kasubag umum distrik okhika

D. Defenisi Operasional

- 1) Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-

karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

- 3) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

E. Instrumen pengumpulan data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Suharsimi, 2004) yang menjadi instrument pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Studi literature.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitaian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat normative yang selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakin penelitian di lakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (fiel research)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari: Data primer adalah kumpulan data dari pengamatan langsung dari lokasi penelitian dan Data sekunder adalah data yang terdiri dari buku-buku literature yang membahas tentang good governance Tata

kelola pemerintahan yang baik, serta teori-teori yang berkenana dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: Reduksi Data, Pemaparan Data (Display Data) dan Menarik Kesimpulan/Verifikasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan capaian tingkat transparansi pada indicator tersebut, dimana sejauh ini capaiannya relative baik namun belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat karena masih ada kecenderungan dalam laporan-laporan pelaksanaan program tertentu, belum dijelaskan capaian hasil dari program tersebut salah satu contohnya dari hal outcome yang dihasilkannya.

2. Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan *good governance*. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, *good governance* tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan dengan penegakan hukum,

dimana sejauh ini mekanisme kerja pada distrik Okhika semuanya telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan komitmen dari pihak pimpinan agar senantiasa dapat dipertahankan dalam pengelolaan kinerja instansi.

3. Akuntabilitas

Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satubdengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Akutabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implimentasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan capaian tingkat akuntabilitas sejauh ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari pegawai selalu memberikan laporan tertulis berkaitan dengan capaian kinerjanya, walaupun masih ada beberapa pegawai yang terkadang terlambat memberikan laporannya.

V. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik good governance dalam hal Transparansi pemerintah distrik okhika telah melaksanakan dengan baik. Segi keterbukaan pemerintah distrik okhika kepada masyarakat dan juga kepada sesama pegawai pada kantor distrik okhika serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataannya dapat dilihat dari besarnya presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah pemerintah Distrik okhika dianggap sudah mampu menjalankan peranya sebagai Pelayan Publik dalam hal transparasi kepada masyarakat distrik okhika dalam menjalankan tugasnya.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance pada kantor Distrik Okhika, dalam mewujudkan *good governance* yaitu Penegakan Hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa baik dalam Penegakan Hukum pemrintah distrik okhika selalu taat pada aturan Hukum yang berlaku, kepala distrik okhika dan seluruh staf pemerintah distrik okhika telah mampu mewujudkan prinsip *Good Governance* meskipun masi

terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan *Good Governance* yang lebih baik lagi khususnya di kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik good governance pada kantor Distrik OKhika Kabupaten Pegunungan Bintang . Dalam hal mewujudkan prinsip good governace tentang Akuntabilitas atau Pertanggung jawaban sangat baik dan selalu bertanggung jawab dari Pemerintah Distrik okhika kepada masyarakat sang baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2005 *Kualitas Pelayanan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arthur, 2004, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM
- Cahyono, Agung, 2005, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Organisasi*, Ed 1, Yogyakarta
- Dharma, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Handoko, 2004, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasibuan, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, : Graha Ilmu Yogyakarta
- Husselid dan Day 1991:387 dalam Agustina, 2007,, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed Revisi, Jakarta :PT. Bumi Aksara.
- Inu Kencana Safei. 2007. *Good Government*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moenir 2002, *Prinsip Kepemimpinan dalam Organisasi*, Ed.II, Rineka Tcipta, Jakarta.
- Ndraha, 2004, *Kebijakan Kinerja Pegawai*. Yogyakarta : BPFE, Jogjakarta
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Corporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta
- Siagian,2001, *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syaddam Syamsuddin, 2000, *Perilaku Organisasi : Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Ed Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo
- Simamora, 2000, *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sugiyono, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta